

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kebijakan fiskal hijau terhadap perbaikan kualitas lingkungan di Indonesia dengan menggunakan metode campuran. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara dan analisis tematik untuk mengidentifikasi implementasi, tantangan, dan peluang kebijakan, sementara pendekatan kuantitatif menggunakan data panel dari 30 provinsi (2018–2023) dan 449 kabupaten/kota (2021–2023). Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa meskipun kebijakan fiskal hijau di Indonesia telah berkembang dalam berbagai instrumen, implementasinya masih terbatas. Tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini berasal dari desain kebijakan, kelembagaan, serta resistensi masyarakat. Lemahnya tata kelola dan kesenjangan kapasitas antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi hambatan utama. Meskipun demikian, terdapat peluang perbaikan, terutama dengan mengadopsi pendekatan berbasis data untuk menentukan sektor dan daerah prioritas, serta memperkuat koordinasi antar lembaga. Dari sisi kuantitatif, penelitian ini menemukan bahwa belanja fungsi lingkungan hidup oleh pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), sementara pajak lingkungan justru menunjukkan dampak negatif di tingkat provinsi dan tidak signifikan di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) berbasis ekologis memiliki efek yang bervariasi, dengan dampak negatif di tingkat provinsi namun positif di tingkat kabupaten/kota. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan fiskal hijau sangat bergantung pada desain kebijakan yang tepat, kualitas kelembagaan, serta tata kelola yang baik.

Kata kunci: kebijakan fiskal hijau, kualitas lingkungan, belanja pemerintah, pajak, transfer daerah

Abstract

This study aims to obtain empirical evidence regarding the impact of green fiscal policy on environmental quality improvement in Indonesia by using a mixed-method approach. The qualitative approach was conducted through interviews and thematic analysis to identify the implementation, challenges, and opportunities of the policy, while the quantitative approach employed panel data from 30 provinces (2018–2023) and 449 regencies/municipalities (2021–2023). The qualitative findings indicate that although green fiscal policies in Indonesia have evolved through various instruments, their implementation remains limited. The main challenges in the implementation stem from policy design, institutional factors, and public resistance. Weak governance and capacity gaps between central and local governments also pose significant obstacles. Nevertheless, there are opportunities for improvement, particularly by adopting data-driven approaches to identify priority sectors and regions, and by strengthening inter-institutional coordination. On the quantitative side, the study finds that local government spending on environmental functions does not have a significant effect on the environmental quality, while environmental taxes show a negative impact at the provincial level and are insignificant at the regency/municipality level. Furthermore, ecological-based intergovernmental transfers and village funds (TKDD) have varying effects, with negative impacts at the provincial level but positive impacts at the regency/municipality level. These findings indicate that the effectiveness of green fiscal policy is highly dependent on proper policy design, institutional quality, and good governance.

Keywords: green fiscal policy, environmental quality, government expenditure, tax, intergovernmental transfers